



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKP) BAPPEDA TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SOLOK
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Visi dan Misi Bappeda	2
	1.3 Data Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
BAB II	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	6
	2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	6
	2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	19
	2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	19
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	20
BAB IV	PENUTUP	21

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas terlaksananya seluruh tugas-tugas dan terselesaikannya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bappeda Kota Solok sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan Bappeda selama satu tahun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini disusun untuk menginformasikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun 2022. Laporan ini merupakan gambaran realisasi dari pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara utuh selama perjalanan Tahun 2022, berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan program kegiatan Bappeda telah diselesaikan dengan baik sesuai target. Namun, dengan adanya laporan ini bisa digunakan sebagai sarana evaluasi agar penyelenggaraan kegiatan Bappeda kedepannya menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam penyusunan LKPj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun 2022.

Solok, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK



Dr. DESMON, M.Pd

NIP. 19681020 199003 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok merupakan salah satu Badan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bappeda Kota Solok mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Tugas dan fungsi Bappeda Kota Solok diatur melalui Peraturan Walikota Solok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Bappeda berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah terhadap pelaksanaan tugas tersebut, termasuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) akhir tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan laporan atas kinerja program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. LKPj ini juga dijadikan sebagai media evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda setiap tahunnya. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

1.2. VISI DAN MISI BAPPEDA

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 126, bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja tersebut sedikitnya memuat hasil evaluasi, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok Bappeda selaku Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan berkontribusi untuk mendukung pencapaian misi ke 5 (lima) yaitu peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan koordinasi antar instansi.
2. Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan perencanaan dan meningkatkan komitmen kebijakan perencanaan.
3. Meningkatkan pemahaman stakeholders dan Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam ketersediaan data perencanaan dan pembangunan daerah
5. Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan
6. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
7. Meningkatkan kualitas pengendalian perencanaan pembangunan

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan aplikasi perencanaan yang terintegrasi secara optimal
2. Memastikan pelaksanaan kalender perencanaan tepat waktu
3. Melaksanakan forum perencanaan (Musrenbang, konsultasi publik, forum PD) secara optimal
4. Menyusun kebijakan dan regulasi terkait perencanaan
5. Melakukan pembinaan terhadap fasilitator perencana
6. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana
7. Mengikuti dan menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan
8. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dan perangkat daerah

9. Melakukan inventarisasi, kompilasi data pembangunan dan penggunaan sistim informasi database perencanaan
10. Memanfaatkan data dan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan secara optimal
11. Menjaga dan menjamin konsistensi keselarasan dokumen perencanaan
12. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah secara optimal

Adapun tujuan Bappeda adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda, maka program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
 - 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1.3. DATA UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas Bappeda adalah membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan Tugas pokok dan Fungsinya tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibangun dengan struktur yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Ekonomi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Kebudayaan
- d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan dan Permukiman.
- e. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Makro;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh aparatur dengan rincian yang dijelaskan sebagai berikut berikut:

**Jumlah Pegawai Bappeda Tahun 2022
Menurut Pangkat / Golongan**

Unit	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala			1	1
Sekretariat	1	7	4	12
Bidang IPW		3	3	6
Bidang Ekonomi		2	3	5
Bidang Sosbud		5	1	6
Bidang PEPPD		5	3	8
Jumlah	1	22	15	38

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp8.678.814.601,00 dengan realisasi keuangan Rp8.195.106.275,00 (94,43%), dan realisasi fisik 103,08% yang digunakan untuk membiayai 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan adalah:

No	Program	Target	Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota - Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	Rp6.972.005.401 100%	Rp6.619.439.092 100%
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rp985.462.700 100%	Rp908.882.035 100%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah - Persentase konsistensi perencanaan dan pendanaan - Persentase keterisian data IKU dan IKD - Persentase pemanfaatan aplikasi pada tahapan perencanaan - Persentase capaian program pada dokumen perencanaan - Persentase capaian IKD pada dokumen perencanaan	Rp721.346.500 85% 85% 80% 100% 80% 80%	Rp666.785.147 96,37% 94,62% 80% 100% 33,91% 44,05%
	Jumlah	Rp8.678.814.601	Rp8.195.106.274

Capaian kinerja pelaksanaan urusan perencanaan masih menggunakan angka sementara karena beberapa indikator seperti capaian program dan capaian IKD masih dalam penghitungan dan menunggu penyampaian data dari OPD. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan perencanaan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dituangkan pada tabel berikut:

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
A	Perencanaan	8.678.814.601,00	8.195.106.274,00	94,43			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.972.005.401,00	6.619.439.092,00	94,94			
A.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.982.000,00	7.982.000,00	100,00			
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100,00			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.925.000,00	3.925.000,00	100,00	-	-	-
	- Dokumen Renja PD	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
	- Dokumen Perubahan renja PD	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.057.000,00	4.057.000,00	100,00	-	-	-
	- Laporan kinerja PD	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
	- Dokumen LKPJ PD	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
	- Dokumen LPPD PD	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
	- Evaluasi Renja PD (triwulan)	4 dokumen	4 dokumen	100,00			
A.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.415.123.901,00	5.139.308.891,00	94,91			
	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.410.533.901,00	5.134.718.891,00	94,90	-	-	-
	- Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	100,00			
	- Tambahan penghasilan PNS	13 bulan	13 bulan	100,00			

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.590.000,00	4.590.000,00	100,00	-	-	-
	- Laporan akrual bulanan	12 dokumen	12 dokumen	100,00			
	- Laporan capaian kinerja PD	12 dokumen	12 dokumen	100,00			
	- Laporan keuangan pemerintah daerah 2022	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
	- Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
	- Laporan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	100,00			
A.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	456.912.100,00	426.326.102,00	93,31			
	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100,00			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.764.000,00	11.637.000,00	98,92	-	-	-
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 jenis	9 jenis	100,00			
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.569.100,00	84.484.300,00	93,28	-	-	-
	- Jumlah penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis	6 jenis	100,00	-	-	-
	- Jumlah penyediaan alat tulis kantor	50 jenis	50 jenis	100,00			
7	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	38.404.000,00	34.644.750,00	90,21	-	-	-
	- Jumlah paket barang cetakan	5 paket	5 paket	100,00			
	- Jumlah penggandaan	50.000 lembar	50.000 lembar	100,00			
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67	-	-	-
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	4 laporan	100,00			
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.175.000,00	289.760.052,00	93,42	-	-	-

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
	- Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100,00			
	- Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	100,00			
	- Makan minum rapat, harian	12 bulan	12 bulan	100,00			
A.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	863.867.400,00	840.445.784,00	97,29			
	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100%	100%	100,00			
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	-	-	-
	Jumlah Materai 10.000	410 buah	410 buah	100,00			
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.173.400,00	196.103.284,00	92,86	-	-	-
	- Jasa telepon	12 bulan	12 bulan	100,00	-		
	- Jasa listrik	11.000 kwh/bulan	11.000 kwh/bulan	100,00			
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	648.594.000,00	640.242.500,00	98,71	-	-	-
	- Jasa Bendahara	12 OB	12 OB	100,00			
	- Jasa Pembantu bendahara pengeluaran	24 OB	24 OB	100,00			
	- Jasa pengelolaan barang	12 OB	12 OB	100,00			
	- Jasa Pegawai Kontrak dan Sopir (9 orang)	108 OB	108 OB	100,00			
	- Jasa Pegawai Non SK Wako (12 orang)	144 OB	144 OB	100,00			
	- Jasa kerjasama pihak ketiga kebersihan kantor	1 paket	1 paket	100,00			

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
A.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.120.000,00	205.376.315,00	90,03			
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100,00			
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.920.000,00	151.881.715,00	89,91	Terdapat perbedaan pelaporan pajak akhir tahun dengan pihak bengkel resmi (yang melaporkan pada tahun berikut), sehingga tidak sesuai dengan administrasi keuangan pemda	Pemeliharaan kendaraan operasional pimpinan tidak dapat direalisasikan	-
	- Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 (4 unit)	48 unit bulan	48 unit bulan	100,00			
	- Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2 (11 unit)	132 unit bulan	132 unit bulan	100,00			
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.500.000,00	22.469.600,00	99,86	-	-	-
	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya/rehab	1 unit	1 unit	100,00			
	- Pemeliharaan instalasi jaringan listrik	1 paket	1 paket	100,00			
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.700.000,00	31.025.000,00	84,54	-	-	-
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100,00	Terdapat item peralatan komputer yang harus diganti namun sudah tidak ada dipasaran	Pemeliharaannya tidak dapat direalisasikan	

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	985.462.700,00	908.882.035,00	92,23			
B.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	636.056.700,00	627.082.846,00	98,59			
	Persentase konsistensi perencanaan dan pendanaan	100%	100%	100,00			
16	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	35.740.000,00	30.271.902,00	84,70	-	-	-
	Laporan dan Koordinasi usulan-usulan DAK/APBN/APBD Provinsi Tahun 2023	3 laporan	3 laporan	100,00	Rapat koordinasi usulan DAK/APBN/APBD Provinsi tidak jadi dilaksanakan oleh provinsi	Efisiensi belanja perjalanan dinas	
17	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.929.200,00	19.929.200,00	100,00	-	-	-
	- Berita Acara konsultasi publik RKPD Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
	- Forum PD	1 kali	1 kali	100,00			
18	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	73.093.300,00	73.093.300,00	100,00	-	-	-
	Berita Acara Musrenbang RKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
19	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	507.294.200,00	503.788.444,00	99,31	-	-	-
	- Perubahan RKPD Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
	- RKPD Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
B.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	104.295.400,00	79.165.129,00	75,90			
	Persentase pemanfaatan aplikasi pada tahapan perencanaan	100%	100%	100,00			
20	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	63.758.400,00	53.735.100,00	84,28	-	-	-
	Tahapan penggunaan e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Tahun	1 Tahun	100,00	Data perencanaan pembangunan diunduh stakeholders pada website e-planning dan sipd kemendagri	Belanja cetak tidak direalisasikan	
					Pendampingan e-planning triwulan IV pada pra musrenbang telah difasilitasi oleh kelurahan	Honor pendampingan e-planning tidak seluruhnya direalisasikan	
21	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	40.537.000,00	25.430.029,00	62,73			
	- Forum data dan informasi tingkat kota	2 kali	2 kali	100,00	Belanja cetak tidak dapat direalisasikan karena sudah menggunakan aplikasi	Efisiensi anggaran cetak sesuai kebutuhan	
	- Database Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00	Sosialisasi pemanfaatan satu data indonesia oleh pemerintah pusat tidak jadi dilaksanakan	Efisiensi belanja perjalanan dinas	

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
B.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	245.110.600,00	202.634.060,00	82,67			
	Persentase capaian program pada dokumen perencanaan	100%	100%	100,00			
22	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	59.899.800,00	23.350.800,00	38,98	Rapat evaluasi kinerja pengelolaan dana DAK dilaksanakan secara daring (online)	Efisiensi belanja perjalanan dinas	
	Laporan pelaksanaan DAK dan Non APBD	4 laporan	4 laporan	100,00			
23	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	185.210.800,00	179.283.260,00	96,80			
	- Laporan Evaluasi RKPD	4 laporan	4 laporan	100,00			
	- Laporan Evaluasi RPJPD	1 laporan	1 laporan	100,00			
C	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	721.346.500,00	666.785.147,00	92,44			
C.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	255.489.900,00	253.628.260,00	99,27			
	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100,00			

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
24	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.586.600,00	72.562.200,00	98,61	-	-	-
	- Rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan subbidang Pemerintahan	2 kali	2 kali	100,00	-	-	
	- Verifikasi dan penajaman Renja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan	11 PD	11 PD	100,00			
	- Verifikasi dan penajaman Perubahan Renja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan	11 PD	11 PD	100,00			
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	112.870.700,00	112.416.889,00	99,60	-	-	-
	- Jasa fasilitator perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	180 OB	180 OB	100,00			
	- Rapat koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan partisipatif bidang sosial dan budaya	1 kali	1 kali	100,00			
	- Verifikasi dan penajaman Renja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia	9 PD	9 PD	100,00			
	- Verifikasi dan penajaman Perubahan Renja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia	9 PD	9 PD	100,00			

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
26	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	69.032.600,00	68.649.171,00	99,44	-	-	-
	- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
	- Laporan survey pembangunan manusia dan sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
	- Rapat koordinasi urusan pembangunan manusia dan sosial	6 kali	6 kali	100,00			
C.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	208.915.200,00	206.349.333,00	98,77			
	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100,00			
27	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.919.400,00	55.666.801,00	97,80	-	-	-
	Rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	4 kali	4 kali	100,00			
	Verifikasi dan penajaman Renja PD	5 PD	5 PD	100,00			
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	51.969.000,00	51.289.455,00	98,69	-	-	-

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
	- Asistensi dan Verifikasi Usulan DAK, APBN dan APBD Propinsi	4 PD	4 PD	100,00			
	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, APBN, APBD Propinsi dan Sumber Dana Lainnya	85 OH	85 OH	100,00			
	- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	4 kali	4 kali	100,00			
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.026.800,00	99.393.077,00	99,37	-	-	-
	- Jasa Fasilitator perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Perekonomian	180 OB	180 OB	100,00			
	- Rapat koordinasi perencanaan pembangunan pertanian dan pangan, pertanian dan pemberdayaan masyarakat	4 kali	4 kali	100,00			
	- Verifikasi dan penajaman Renja PD	2 PD	2 PD	100,00			
	- Verifikasi dan penajaman perubahan Renja PD	7 PD	7 PD	100,00			
C.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	256.941.400,00	206.807.554,00	80,49			
	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100,00			

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.867.800,00	95.844.017,00	91,40	-	-	-
	- Jasa Fasilitator perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	180 OB	180 OB	66,67			
	- Pendampingan proses perencanaan pembangunan partisipatif bidang IPW di OPD	3 PD	3 PD	100,00			
	- Rapat koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub bidang infrastruktur	3 kali	2 kali	66,67			
	- Verifikasi dan penajaman perubahan renja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur	3 PD	3 PD	100,00			
	- Verifikasi dan penajaman renja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur	3 PD	3 PD	100,00			
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	120.722.600,00	89.835.077,00	74,41	-	-	-

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Upaya Atasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	8	9
	- Rapat Koordinasi Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sektoral	12 kali	12 kali	100,00	- Pendataan PSU Perumahan tidak menggunakan seluruh anggaran - Belanja cetak dokumen RPIJM tidak direalisasikan karena Kementerian PUPR masih melakukan pengembangan sistem informasi bidang cipta karya	Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan	
	- Updating data pada aplikasi sistem informasi pembangunan kawasan permukiman (SIPKP) dan sektoral	1 kali	1 kali	100,00			
	- Laporan pendataan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.351.000,00	21.128.460,00	67,39	Koordinasi dan konsultasi luar Kota Solok tidak banyak yang perlu diikuti	Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan	
	- Rapat koordinasi/harmonisasi/ sinergitas perencanaan (sumber dana APBD dan non APBD)	3 kali	3 kali	100,00			
	- Verifikasi dan penajaman renja PD lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 PD	1 PD	100,00			
	- Verifikasi dan penajaman perubahan Renja PD lingkup sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup	1 PD	1 PD	100,00			
	Jumlah	8.678.814.601,00	8.195.106.274,00	94,43			

Kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah telah diselaraskan dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pada urusan perencanaan tidak ada kebijakan strategis yang ditetapkan dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tidak ada kebijakan untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya terkait pelaksanaan urusan perencanaan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

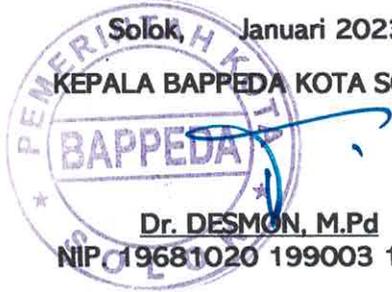
Bappeda tidak ada melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Tahun 2022 memuat hasil pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda yang dibiayai oleh APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022. Secara umum dari 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran 94,43% dan realisasi fisik 103,08%.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bappeda Tahun 2022 ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Solok kepada DPRD.

Solok, Januari 2023
KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Dr. DESMON, M.Pd
NIP.19681020 199003 1 004